

PERANAN KOMUNIKASI KEPALA DESA SEBAGAI SARANA PENINGKATAN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DESA

¹Erna Kurniawati, ²Wahyu Prianto

¹Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Institut Agama Islam Kendari.
email: ernakurniawati@iainkendari.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Kendari
email: wahyuprianto11@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan komunikasi kepala desa sebagai sarana dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya komunikasi sebagai elemen fundamental dalam menciptakan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kepala desa memiliki peranan strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat transparansi, serta membangun kepercayaan publik. Komunikasi yang dilakukan tidak hanya bersifat formal melalui musyawarah desa, tetapi juga informal melalui interaksi langsung dan pemanfaatan media digital. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan kemampuan komunikasi kepala desa, rendahnya literasi masyarakat, serta kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas komunikasi kepala desa melalui pelatihan serta penguatan sistem komunikasi yang terbuka dan partisipatif. Dengan demikian, komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Komunikasi; Kepala Desa; Pemerintahan Desa; Partisipasi Masyarakat; Efektivitas

Abstract

This study aims to analyze the role of village head communication as a means of increasing the effectiveness of village governance. The background of this research is based on the importance of communication as a fundamental element in creating a transparent, participatory, and accountable village government. This study used a qualitative approach with descriptive research, where data were obtained through interviews, observation, and documentation. The results indicate that village head communication plays a strategic role in increasing community participation, strengthening transparency, and building public trust. Communication is not only formal through village deliberations but also informal through direct interaction and the use of digital media. However, several obstacles to its implementation exist, such as limited communication skills of village heads, low community literacy, and suboptimal use of information technology. Therefore, it is necessary to increase the communication capacity of village heads through training and strengthening an open and participatory communication system. Therefore, effective communication is key to realizing effective and sustainable village governance.

Keywords: Communication; Village Head; Village Government; Community Participation; Effectiveness

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada tingkat desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Tidak terkecuali pada jabatan Kepala desa sebagai pemimpin di lingkup desayang memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi yang efektif guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Kualitas komunikasi yang baik akan mendorong terciptanya hubungan harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan, serta memperkuat legitimasi pemerintah desa. Sebaliknya, komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesenjangan informasi, konflik sosial, serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat. Dalam praktiknya, berbagai kendala komunikasi masih sering terjadi, seperti kurangnya keterbukaan informasi, keterbatasan kemampuan komunikasi kepala desa, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas komunikasi menjadi kebutuhan penting dalam mewujudkan efektivitas pemerintahan desa yang optimal. Perkembangan teknologi digital juga menuntut kepala desa untuk adaptif dalam menggunakan berbagai media komunikasi modern guna menjangkau masyarakat secara lebih luas dan cepat.

Kualitas komunikasi kepala desa sangat menentukan keberhasilan program-program pemerintahan desa. Komunikasi yang baik mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Dalam praktiknya, Seiring perjalanannya pemerintahan desa yang berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di mana seorang pejabat kepala desa kini lahir berdasarkan suara masyarakat desa sehingga sirkulasi pemerintahan di desa sangatlah membutuhkan komunikasi publik oleh seorang pejabat Kepala Desa untuk melaksanakan pemerintahan desa yang dipandang hadir oleh masyarakat desa itu sendiri, sejalan dengan hal tersebut juga fenomena yang ikut bersamaan dengan hal tersebut adalah disadari bahwa kualitas sumber daya manusia di lingkup desa yang masih sangat terbatas untuk melahirkan sosok pemimpin kepala desa yang memiliki komunikasi publik yang baik dalam menjalankan pemerintahan desa yang independen Hal ini tentu menjadi problem sekaligus tantangan bagi pemerintahan desa khususnya seorang pejabat desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Kendala tersebut dapat berupa kurangnya transparansi informasi, minimnya penggunaan media komunikasi yang efektif, serta keterbatasan kemampuan komunikasi interpersonal kepala desa. Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu efektivitas pemerintahan desa tidak hanya diukur dari keberhasilan program pembangunan, tetapi juga dari tingkat partisipasi masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang terbuka, partisipatif, dan responsif agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses pembangunan desa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas komunikasi kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana Bagaimana Peranan Komunikasi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang

dialami subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara mendalam kualitas komunikasi kepala desa dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan desa. Sumber data dalam penelitian kualitatif terdiri dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui pemberitaan dan observasi, seperti kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen, arsip, buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang meliputi Reduksi data yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan data, Penyajian data yaitu penyusunan data dalam bentuk narasi deskriptif dan Penarikan kesimpulan yaitu interpretasi data untuk memperoleh temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan pemerintah terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan jika diibaratkan dalam anatomi tubuh desa diibaratkan sebagai kaki jadi bisa dikatakan bahwa desa merupakan motor penggerak dalam suatu Negara. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa, dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landshappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan bantuan menggunakan beberapa panggilan lain dibantu dengan bantuan menggunakan perangkat Desa sebagai perincian dari pemerintahan Desa.

Berangkat dari hal tersebut desa yang saat ini dikelola melalui keberadaan pemerintahan desa, dimana pemerintahan desa sendiri dipimpin oleh seorang kepala desa. seorang kepala desa bukanlah tugas yang sederhana, melainkan sebuah amanah besar yang menuntut kemampuan kepemimpinan, komunikasi, serta integritas yang tinggi. Kepala desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga segala kebijakan dan tindakan yang diambil akan sangat mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan di tingkat desa. Salah satu tantangan utama yang dihadapi

kepala desa adalah kemampuan komunikasi publik. Kepala desa dituntut mampu menyampaikan informasi secara jelas, terbuka, dan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan dan pemahaman yang beragam. Ketidakmampuan dalam berkomunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik, bahkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Disisi lain Komunikasi khususnya komunikasi public, digunakan untuk menyampaikan informasi kepada publik yang luas. Komunikasi masa dalam bentuk lembaga atau instansi maka komunikatornya pun terlembagakan. Semuanya terorganisasikan dengan baik untuk menyampaikan pesan dengan tujuan khalayak yang besar, heterogen dan anonim.¹⁵ Komunikasinya pun berjalan secara serempak. Seseorang perlu diperkenalkan lebih luas agar dikenal. Memperkenalkan kelebihan dan keunggulan yang dimiliki melalui media digital. Menyampaikan pesanyang diinginkan di ruang publik adalah hal yang tepat untuk lebih dikenal luas. Berkembangnya teknologi informasi menuntut perubahan sosial. Masyarakat yang berkembang mengganti cara lama dalam berkomunikasi dengan cara baru. Zaman dahulu komunikasi jarak jauh dengan menggunakan surat lalu berkembang dengan telegram. Semakin berkembang komunikasi massa dengan munculnya media radio. Saat ini perkembangan teknologi informasi mendorong masyarakat untuk berkomunikasi melalui jaringan internet dengan sosial media. Perubahan sosial dalam berkomunikasi ini berdasarkan Difusi Inovasi.

Komunikasi kepala desa memiliki peranan strategis dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan desa. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan kunci utama dalam keberhasilan organisasi. Komunikasi yang baik mampu menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat. Kepala desa sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara jelas, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan publik.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan komunikasi, antara lain keterbatasan kemampuan komunikasi seorang kepala desa, rendahnya literasi masyarakat, serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi. Hambatan ini berdampak pada kurang optimalnya penyampaian informasi kepada masyarakat.

Selain itu, faktor budaya dan kebiasaan masyarakat juga mempengaruhi efektivitas komunikasi. Dalam beberapa kasus, masyarakat masih enggan untuk menyampaikan pendapat atau kritik terhadap pemerintah desa. Komunikasi yang efektif berdampak positif terhadap efektivitas pemerintahan desa, antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat transparansi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, komunikasi yang tidak efektif dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dianalisis bahwa kualitas komunikasi kepala desa sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa. Komunikasi yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan desa, selain itu hal ini juga menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan kapasitas komunikasi kepala desa, baik melalui pelatihan maupun pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, pemerintah desa perlu membangun sistem komunikasi yang lebih terbuka dan partisipatif.

Sejalan dengan hal tersebut dapat pula disimpulkan bahwa gambaran bahwa komunikasi kepala desa memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Komunikasi yang dilakukan kepala desa tidak hanya bersifat formal, tetapi juga informal melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi, kebijakan, serta program-program pembangunan desa. Dalam praktiknya, kepala desa menggunakan beberapa bentuk komunikasi, antara lain komunikasi langsung melalui musyawarah desa, komunikasi

interpersonal dengan masyarakat, serta komunikasi melalui media digital seperti *WhatsApp* dan media sosial. Namun demikian, efektivitas komunikasi tersebut masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kemampuan komunikasi kepala desa, tingkat pendidikan masyarakat, serta ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat cenderung meningkat ketika kepala desa mampu menyampaikan informasi secara terbuka dan transparan. Sebaliknya, kurangnya komunikasi yang efektif menyebabkan terjadinya kesalahpahaman dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

Sehingga dengan demikian komunikasi kepala desa memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan desa. Komunikasi yang efektif mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, serta kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas komunikasi kepala desa melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kepala desa sebagai pemimpin utama yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa tidak hanya dituntut memiliki kemampuan administratif, tetapi juga kemampuan komunikasi yang efektif sebagai sarana utama dalam mengelola hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Kualitas komunikasi kepala desa terbukti memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Komunikasi yang efektif mampu menciptakan hubungan yang harmonis, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat transparansi, serta membangun kepercayaan publik. Sebaliknya, komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik sosial, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

Dalam praktiknya, pelaksanaan komunikasi kepala desa masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan kemampuan komunikasi, rendahnya tingkat literasi masyarakat, serta kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, faktor sosial dan budaya masyarakat juga turut mempengaruhi efektivitas komunikasi yang berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas komunikasi kepala desa, antara lain melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan komunikasi publik, serta pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Di samping itu, perlu dibangun sistem komunikasi yang terbuka, partisipatif, dan responsif guna mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa komunikasi kepala desa merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan partisipatif, sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan desa secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan jurnal ini dengan judul “Peranan Komunikasi Kepala Desa sebagai Sarana Peningkatan Efektivitas Pemerintahan Desa” dapat diselesaikan dengan baik. Dalam proses penyusunan jurnal ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pimpinan dan dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Institut Agama Islam Kendari yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

2. Kepala desa dan perangkat desa yang telah bersedia memberikan informasi serta membantu dalam proses pengumpulan data penelitian.
3. Masyarakat desa yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam penelitian ini.
4. Rekan-rekan serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan moral maupun bantuan selama proses penyusunan jurnal ini.

Penulis menyadari bahwa jurnal ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pemerintahan desa dan komunikasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, Onong Uchjana. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mulyana, Deddy. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015
- Widjaja, H.A.W. Otonomi Desa. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ndraha, Taliziduhu. Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta, 2018
- Mulyana, Deddy. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Widjaja, H.A.W. Otonomi Desa. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007
- R. Yando Zakaria, Merebut Negara”;Lapera Pustaka Utama dan KARSA, Yogyakarta, 2004.”
- Mansyur, Achmad., Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif. (Jakarta: PT.Balai Pustaka,2018).
- A.W. Widjaja., Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003).
- Juwono Tri Atmodjo, “MEDIA MASSA DAN RUANG PUBLIK (Analisis Perilaku Penggunaan Sosial Media Dan Kemampuan Remaja Dalam Menulis),” Jurnal Visi Komunikasi14, no. 2 (2015):
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- MATERIKULIAH KOMUNIKASI MASSA PENGERTIAN KOMUNIKASI MASSA | Arianto Kadir Academia.Edu,” accessed October 22, 2018https://www.academia.edu/35458191/MATERI_KULIAH_KOMUNIKASI_MASSA_PENGERTIAN_KOMUNIKASI_MASSA.
- Julijanti Julijanti et al., “Operationalization Process Of Forest Management Unit Policies: A Perspective Of Diffusion Of Innovations Theory,” Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan12, no. 1 (2015):67–88, <https://doi.org/10.20886/jakk.2015.12.1.67-88>.